

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan ditandai dengan berbagai perundang-undangan yang diberlakukan. Setidaknya sudah enam kali perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1999, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1945, Undang-undang nomor 22 tahun 1948, Undang-undang nomor 1 tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-undang nomor 22 tahun 1999. Dengan perubahan undang-undang tersebut, implikasinya adalah terjadi perubahan atas daerah-daerah dalam arti yang semula peningkatan status daerah seperti dari kecamatan berubah menjadi kabupaten dan kota/kotamadya, dari kabupaten atau kota/kotamadya berubah menjadi propinsi

Salah satu tuntutan Era Reformasi 1998 adalah otonom daerah, Disaat itulah para perjuangan masyarakat Buol ingin memekarkan diri menjadi kabupaten sendiri, karena pada tahun 1964 Buol masih tergabung dalam dua daerah yaitu Buol-Tolitoli. dengan hal ini munculah Gerakan Sosial-Politik, Timbul pemikiran-pemikiran dari masyarakat yang ada di wilayah Buol dan di rantau, seperti di Makasar, Palu, Jakarta dan di Gorontalo, untuk melaksanakan Simposium Dialog yang berjudul “*Buol Hari Ini dan Kedepan*”. Dengan adanya Simposium tersebut, hampir seluruh masyarakat Buol hadir pada acara Musyawarah untuk bersama-sama memikirkan apakah Buol hanya tetap begini dan selamanya tidak ada perubahan, Hal ini munculah Ide dari

masyarakat Buol yang ada di rantau, seperti Abdul Karim Mbouw (Ketua), Ibrahim Timumun (Sekertaris), Arif Lamaka, Moh. Yahya Pusadan, Hamzah P. Katjong. M, Yasin Pusadan, Dahlan Makatu, Harun. K. Siatan, Ramlah Butudoka, Ny. Ratna Lasman Mbouw. Mahadali H. Ismail, Amrid Butudoka, Amran Hi. Rasyid. Amran U. Salim. Mereka berembuk di Palu, isi dari rembukan tersebut adalah *Mo Kumbulyopo Kito Tandanilyo Tilro Bwuolyo* (Mari Kita Berkumpul Semua Orang Buol) baik yang ada di wilayah Buol maupun di Rantau. Dari hasil Remukan tersebut, muncullah TAWAB (Temu Akrab Warga Buol).

Melalui TAWAB itulah, timbul Ide perjuangan menuntut pembentukan kabupaten yang terjadi pada tahun 1996. Dengan adanya suatu TAWAB melahirkan sebuah IKIB (Ikatan Keluarga Indonesia Buol), salah satu program IKIB adalah menuntut pemekaran wilayah Buol menjadi kabupaten. Pada tahun 1997 inilah menjadi bentuk perjuangan masyarakat Buol, keluar dari pemerintahan Buol Tolitolil, yang telah di sampaikan oleh Panitia Pendukung Persiapan Pembentukan Kabupaten Admistratif (P.4.K.B.)

Pada tahun 1999 wilayah Buol menjadi kabupaten yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buol Toli-toli, Kabupaten Buol dimekarkan bersdasarkan Undang-undang No. 51 tahun 1999, dan disahkan pada tanggal 16 September tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 November tahun 1999, atas nama Menteri Dalam Negeri yaitu Gubernur H.B Paliudju. Ir. Abdul Karim Mbouw dilantik di Jakarta sebagai Pejabat Bupati Buol pertama pada tanggal 12 Oktober tahun 1999.

Lebih dari factor-faktor di atas, mencermati fenomena historis diwilayah Buol. Pada dasarnya merupakan akumulasi dari factor-faktor pada periode-periode sebelumnya dan kemudian di jawab oleh kaum Intelektual bersama masyarakat sebagai pendukungnya dengan jalan Memperjuangkan kedaerahnya. Secara garis besar terdapat beberapa nilai-nilai terkait dengan peristiwa perjuangan pembentukan wilayah Buol menjadi sebuah Kabupaten.

1. Keberanian berbuat dan bertanggungjawab untuk kepentingan bersama
2. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi
3. Memiliki kerelaan berkorban
4. Berbuat tanpa pamri.

B. Saran

Perjuangan Pembentukan Kabupaten Buol merupakan Amanat yang mempunyai pesan yang sangat bermakna bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada Tanggal 17 Agustus 1945 ini dibangun dalam sebuah kerangka Negara yang berbentuk kesatuan, oleh karenanya, Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*otonomi daerah*) Haruslah diletakan dalam bingkai pemahaman Negara yang berbentuk kesatuan. Lebih dari factor-faktor diatas mencermati fenomena historis di wilayah Kabupaten Buol yang harus di perjuangkan oleh tokoh masyarakat Buol untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fenomena historis yang terjadi di daerah Buol dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat lain yang hidup dalam zaman yang semakin menuntut kita untuk saling bertoleransi dan bersosialisasi.

Sebuah harapan besar dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsi akademik bagi Universitas Negeri Gorontalo sebagai lembaga Pendidikan, serta dapat juga menjadi sumbangsih bagi daerah Kabupaten Buol, Sekaligus agar dapat menjadi referensi keilmuan bagi pembaca.

Harapannya kedepan bisa membantu penelitian yang memiliki subjek dan objek yang sama, semua demi kemajuan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dudung Abdurracman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta; Ombak, 2011.
- Darwin Une, Agil Bahsoan, Lukman D. Katili, Dkk. *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Gorontalo; Ideas Publishing, Agustus 2013.
- Eko Handoyo *Sosiologi Politik*. Yogyakarta; Ombak, 2013.
- H. Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung; CV Pustaka Setia, 2014.
- H. Utang Rosidin, *Otonom Daerah dan Desentralisasi*. Bandung; Pustaka Setia, 2010.
- Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta; Ombak, 2016
- Ibrahim Samad, *Sejarah Buol. Jilid I,II*. Palu; Reuni PNRI. 2000, 2010.
- Ibrahim Turungku, *Upacara Adat Tradisional Suku Buol*. Buol; Badan Pekerja Dewan Adat Kabupaten Buol, Februari 2006.
- Joni Apriyanto, *Sejarah Gorontalo Modern*. Cetakan Ke-II, Gorontalo; Universitas Negeri Gorontalo Press, 2011.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta; Gramedia, 2015
- N. Daldjoeni, *Geografi Kesejarahan I (Peradaban Dunia)*. Bandung; Alumni, 1982.
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Yogyakarta; Ombak, 2016.
- Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan Di Indonesia kajian Sosial Ekonomi*. Cetakan ke-I, Yogyakarta; ADITYA Media, Juni 1991.
- Tirtarahardja, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta; Rineka Cipta, 2000.

Tesis Dan Jurnal:

Dwiana Hercahyanti. 2008. Tesis. *Sejarah Pembentukan Gorontalo dari Kabupaten menjadi Propinsi 1953-2000*. Jakatra; Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Sukrinto S. Alijuana. 2014. Jurnal. *Perkembangan Pendidikan di Buol Abad XX*, Gorontalo; Program Studi Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Gorontalo.

Nopiya Idris. 2014. Jurnal, *Hubungan Sosial Kultur Kerajaan Buol Dengan Gorontalo Awal Abad XIX*. Gorontalo; Program Studi Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Gorontalo.

Wawancara :

Bapak H. Ibrahim Timumun. wawancara tanggal 17-18 April 2018, Di Buol, Kecamatan Biau.

Bapak Hartono wawancara, tanggal 23 April 2018 Di Kel. Kali Kecamatan Biau

Ibu Hj. Maryam G. Mailili wawancara, tanggal 23 April 2018, Di Kel. Kali, Kecamatan Biau.

Bapak Mohammad Safri, wawancara, tanggal 28 April 2018, Di Kel. Leok I, Kecamatan Biau.

Bapak Saipul S. Sio, wawancara, 25 April 2018. Di Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat.

Bapak Usman Balo Turungku, wawancara, 28 April 2018. Di Desa Lunguto, Kecamatan Paleleh Barat

Bapak Iskandar Lapaji, wawancara, 24 April 2018. Di Desa Lunguto Kecamatan Paleleh Barat.

Internet :

Ratty Puspitasari. 2014. Jurnal. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Daerah Baru (Studi Kelayakan)* tersedia dalam (<https://media.neliti.com/media/publications/31726-ID-.pdf>) di akses tanggal 8 Mei 2018, Jam 1.38 am.)